

PERAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI PROVINSI DKI JAKARTA

Heri Sasono

STIE Dharma Bumiputera, Jakarta

Email : heribtc@yahoo.co.id

Herlina

STIE Dharma Bumiputera, Jakarta

Email : liena10704@gmail.com

Korespondensi penulis: heribtc@yahoo.co.id

ABSTRACT

Community service needs to be carried out by the government or by academics such as; lecturers, teachers and students. The Indonesian government in the Covid-19 Pandemic Era, is very attentive to MSME actors. The attention here is manifested in the form of additional capital assistance to MSMEs whose capital is of course very limited, making it difficult to survive in the Pandemic Era. To maintain the continuity of MSMEs, the Government of Indonesia has focused on paying attention to the existence and growth of MSMEs reaching Rp. Rp123.46 trillion (or 17.75%) was allocated specifically to support MSMEs. Types of Assistance for the National Economic Recovery Program for MSMEs are (a). Subsidies (b). Placement of Funds for Credit Restructuring (c). Expenditures for Fees (d). Guarantee for Working Capital and (e). Final PPh borne by the government (f). Investment Financing to Cooperatives through LDPB.

Keywords: *The role of government; DISPERINDAGKOP; Development of MSMEs in DKI Jakarta province*

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat perlu dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh para akademisi seperti; dosen, guru dan mahasiswa. Pemerintah Indonesia di Era Pandemi Covid 19, sangat penuh perhatian terhadap para pelaku UMKM. Perhatian disini diwujudkan dalam bentuk bantuan penambahan modal kepada para UMKM yang tentunya modalnya sangat terbatas, sehingga mengalami kesulitan untuk bertahan di Era Pandemi. Untuk menjaga kelangsungan UMKM, Pemerintah Indonesia telah fokus memperhatikan eksistensi dan pertumbuhan UMKM mencapai setahun 2020 sebesar Rp695,2 triliun, sebesar Rp123,46 triliun (atau 17,75%) dialokasikan khusus untuk mendukung UMKM. Jenis Bantuan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM berupa (a). Subsidi (b). Penempatan Dana untuk Restrukturisasi Kredit (c). Belanja Imbal Jasa (d). Penjaminan untuk Modal Kerja dan (e). PPh Final Ditanggung Pemerintah (f). Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LDPB.

Kata kunci : Peran pemerintah; DISPERINDAGKOP; Pengembangan UMKM provinsi DKI Jakarta

PENDAHULUAN

UMKM adalah salah satu solusi dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Keberadaan UMKM merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, merupakan indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi. UMKM terbukti dapat diandalkan sebagai pengaman dimasa krisis, melalui mekanisme penciptaan kesempatan kerja dan nilai tambah. Keberhasilan dalam meningkatkan UMKM akan memperkuat bisnis perekonomian masyarakat. UMKM akan membantu mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional sekaligus sebagai sumber dukungan nyata terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan NKRI.

Perkembangan dan kemajuan UMKM sangat ditentukan oleh stakeholder UMKM, tetapi dukungan dari pihak eksternal sangat penting, karena adanya keterbatasan kapasitas dan faktor-faktor lain agar eksistensi dan keberlangsungannya dapat dipertahankan. Berbagai keterbatasan UMKM untuk melangsungkan aktivitas dan perkembangannya antara lain; lemahnya permodalan, kurangnya kewirausahaan, teknik produksi masih sederhana, serta terbatasnya kemampuan manajemen dan pemasaran (Faolina, 2017).

Kurangnya kemampuan modal sebagai salah satu dari sekian banyak faktor penghambat kemajuan UMKM yang seharusnya dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, seperti; pemerintah dan lembaga keuangan dan permodalan dari pelaku UMKM sendiri.

Disperindagkop dan UKM Pemprov DKI Jakarta mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan tugas pembantuan yang diberikan. Disperindagkop dan UKM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, Disperindagkop dan UKM dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena permasalahannya kompleks, dinamis dan penuh makna, penelitian ini dirancang untuk melihat sejauh mana peran DINAS PERINDUSTRIAN, PERDANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PEMPROV DKI JAKARTA.

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah para UMKM di Jakarta Selatan, Khususnya Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

UMKM yang dijadikan obyek pebelitian adalah UMKM yang bergerak di bidang Warung sembako, frozen food dan buah, kue kering & basah, makanan ringan, kuliner, jasa pembuah pot & keranjang parcel, warung jajanan, mie ayam dan lain-lain.

SumberData

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

(1). Data Primer.

Menurut Sugiyono (2018:67) menjelaskan bahwa data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan perseorangan seperti hasil wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang telah ada (Sugiyono, 2018:68). Data sekunder diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Nasir, 2018:174). Lebih lanjut Emzir (2015:37) menjelaskan bahwa, pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi berupa dokumen pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar, dan percakapan informal merupakan sumber data kualitatif.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan pengumpulan data dan setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban atau data yang ada sampai memenuhi kriteria yang disyaratkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Bumiputera, Jakarta telah dipercaya oleh Disperindagkop dan UKM Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pembinaan, pelatihan, pengembangan dan pendampingan para pelaku UMKM di Pemprov DKI Jakarta, khususnya UMKM di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dengan Kerjasama Nomor : 4586/-1.828, Tertanggal 28 Agustus 2020.

Selama Pandemi Covid 19, agar para UMKM di Indonesia, khususnya di Pemprov DKI Jakarta, maka Disperindagkop dan UKM Pemprov DKI Jakarta untuk membantu para UMKM di Pemprov DKI Jakarta akan memberikan bantuan penambahan modal usaha kepada para pelaku UMKM di Pemprov DKI Jakarta.

Berikut data UMKM di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan yang telah berhasil dikumpulkan selama 5 bulan (Bulan September 2020 sampai Januari 2021) oleh STIE Dharma Bumiputera, Jakarta dan telah mendapatkan Bantuan Modal Usaha sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) masing-masing pelaku UMKM dari Disperindagkop dan UKM Pemprov DKI Jakarta untuk membantu para UMKM di Pemprov DKI Jakarta.

UMKM Yang Mendapatkan Bantuan Modal
Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan Sekitarnya

No.	Jumlah UMKM	UMKM Mendapatkan Bantuan Modal Usaha
1	Warung Makanan & Minuman	24
2	Kue Kering	22
3	Fashion, Taylor (Baju dll)	16
5	HP dan Pula	13
6	Frozen Food	11
7	Buah & Sayuran	5
	Total	91

Sumber : UMKM Kecamatan Pancoran, Jaksel

Pemerintah telah memberikan dukungan terhadap UMKM 2020 Dari total biaya yang dialokasikan pemerintah untuk penanganan Covid-19 pada tahun 2020 sebesar Rp.695,2 triliun, sebesar Rp123,46 triliun (atau 17,75%) dialokasikan khusus untuk mendukung UMKM. Bantuan fiskal untuk UMKM tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan data di atas maka jumlah tersebut dialokasikan untuk enam kegiatan, yakni subsidi bunga sebesar Rp35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi sebesar Rp.78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) sebesar Rp.5 triliun, PPh final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp.2,4 triliun, serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) sebesar Rp1 triliun rupiah (Kompas, 2 September 2020).

Jenis Bantuan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM (Rp) (1). Subsidi Bunga Rp. 35,28 triliun (2). Penempatan Dana untuk Restrukturisasi Kredit Rp. 78,78 triliun (3). Belanja Imbal Jasa Penjaminan 5 triliun (4). Penjaminan untuk Modal Kerja Rp. 1 triliun (5. PPh Final Ditanggung Pemerintah Rp. 2,4 triliun 6. Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LDPB 1 triliun Total Rp. 123,47 triliun.

Data UMKM Pemrov DKI Jakarta

Tahun	Jumlah UMKM	Pertumbuhan (%)
2014	1.336	-
2015	1.548	15,87
2016	1.925	24,35
2017	2.352	22,18
2018	2.860	21,60
2019	3.418	19,51
2020	4.058	18,72

Sumber : Pemrov DKI Jakarta

Jumlah UMKM di DKI Jakarta jumlahnya mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai 2021 dan kenaikan terbesar pada tahun 2017 mencapai sebesar 22,18 % dan terkecil tahun 2015 sebesar 15,87 %.

Pelaku UMKM di Jakarta

Wilayah	Jumlah UMKM Lokasi Binaan	Jumlah UMKM Lokasi Sementara
Jakarta Barat	742	2.120
Jakarta Pusat	570	3.009
Jakarta Selatan	544	2.656
Jakarta Timur	587	2.464
Jakarta Utara	1.152	768

Sumber : Pemrov DKI Jakarta

Pelaku UMKM Lokasi Binaan di DKI Jakarta, terbanyak adalah di Jakarta Utara sebanyak 1.152 UMKM dan tekecil di Jakarta Selatan hanya sebanyak 544 UMKM. Sementara jumlah UMKM Lokasi Sementara terbanyak adalah Jakarta Pusat mencapai 3.009 UMKM dan Terkecil adalah Jakarta Utara sebanyak 768 UMKM.

Teknologi yang semakin berkembang ini tentunya dimanfaatkan oleh sebagian besar manusia untuk menunjang segala aktifitasnya. Segala sesuatu hampir tidak lepas dari penggunaan teknologi, mulai dari komunikasi, informasi, hingga transportasi saat ini sudah mulai terdigitalisasi. Sementara di DKI Jakarta, UMKM memang merupakan usaha yang mendominasi sebesar hampir 93,46% usaha di DKI Jakarta (Nis, 2017). Apabila dilihat dari data jumlah UMKM Binaan Dinas UMKM DKI Jakarta, terdapat sekitar 14.000 pelaku UMKM binaan dan sementara yang tersebar di beberapa wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa DKI Jakarta merupakan kota yang perekonomiannya di dominasi oleh UMKM. Namun, belum ada data pasti yang menunjukkan jumlah UMKM yang telah memanfaatkan e-commerce di DKI Jakarta. Akan tetapi, data dari Delloitte Acces Economics menunjukkan lebih dari sepertiga atau 36% UMKM di Indonesia masih bersifat offline dan sepertiga lainnya atau 37% hanya memiliki kemampuan online yang sangat mendasar seperti komputer atau aksesbroadband. Sedangkan kurang dari sepersepuluh atau 9% yang merupakan bisnis online lanjutan dengan memanfaatkan e-commerce.

KESIMPULAN DAN SARAN

Di era yang semakin modern dan terdigitalisasi seperti sekarang ini, UMKM dituntut untuk dapat terus berinovasi baik dalam produk maupun dalam tahap produksi. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing serta untuk menjaga kelangsungan UMKM dan Pemerintah Indonesia telah fokus memperhatikan eksistensi dan pertumbuhan UMKM di Masa pandemi Covid 19, mencapai setahun 2020 sebesar Rp. 695,2 triliun, sebesar Rp.123,46 triliun (atau 17,75%) dialokasikan khusus untuk mendukung UMKM. Jenis Bantuan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM berupa (a). Subsidi (b). Penempatan Dana untuk Restrukturisasi Kredit

(c). Belanja Imbal Jasa (d). Penjaminan untuk Modal Kerja dan (e). PPh Final Ditanggung Pemerintah (f). Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LDPB.

Harapan para pelaku UMKM, perhatian Pemerintah harus tetap dipertahankan di era setelah Pandemi Covid 19, bahkan sedapat mungkin harus ditingkatkan, karena peran UMKM bagi perekonomian cukup besar dan signifikan untuk pembangunan NKRI dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Anoraga, Pandji, dan Sudantoko, Djoko. (2012). *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta : Rineka Cipta.

Azwar, Saifuddin. (2015). *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Badan Pusat Statistik (BPS) (2021) Indonesia.

Disperindagkop dan UKM Pemprov DKI Jakarta (2021) Pemprov DKI, Jakarta.

Emzir, (2015), *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Fatimah & Darna. (2011), Peranan Koperasi Dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil Dan Mikro (UKM). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 127-138.

Koran Kompas 2 September 2020.

Masyarakat Di Kawasan Dolly Surabaya. *Jurnal An-Nisbah*, 1(1) Prasetyo, E. (2008). Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran. *Jurnal Akmenika UPY*, 2(1)

Nasir, Moh. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah, (2015) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

- Subandi. (2007). *Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang*. Palembang: Univerdsita Airlangga.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta. Sutarto, Sri Edi. 2005. *Koperasi: Nilai-Tambah Ekonomi, Nilai-Tambah Sosial Kultural. Sokoguru Perekonomian*. Jakarta: Penerbit Yayasan Hatta.
- Sulaeman. (2014). Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kabupaten Malang. *Jurnal Modernisasi*, 5(3), 68-89.
- Undang- Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM Undang Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Widiyanti, Ninik. 2016. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.